

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah kota dalam pemberdayaan perempuan disabilitas melalui Himpunan wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kota Jambi, latar belakang penelitian didasari oleh masih rendahnya partisipasi sosial dan ekonomi perempuan disabilitas akibat adanya stigma, diskriminasi, subordinat, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan, pelatihan dan pekerjaan. Pemerintah melalui HWDI hadir berperan dalam memperjuangkan hak, potensi, serta pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan utama adalah ketua HWDI Provinsi Jambi, penelitian dianalisis menggunakan teori Peran yang terdiri dari tiga pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, dan pemerintah sebagai fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai Regulator, pemerintah telah menetapkan peraturan yang jelas, seperti Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019, yang memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan kesadaran tentang potensi perempuan disabilitas. Sebagai Fasilitator, pemerintah menyediakan sumber daya dan dukungan untuk program pemberdayaan, tetapi masih terdapat kekurangan dalam penyediaan layanan yang aksesibel dan responsif terhadap kebutuhan perempuan disabilitas. Dari penelitian juga ditemukan kendala dalam peran pemerintah kota terhadap pemberdayaan perempuan disabilitas di kota Jambi yaitu ketidakterediaan rencana pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan, rendahnya partisipasi aktif perempuan disabilitas dalam proses perencanaan kebijakan, sosialisasi inklusi yang terbatas, minimnya alokasi anggaran serta minimnya layanan khusus dan aksesibilitas bagi perempuan disabilitas

Kata kunci: HWDI, Pemberdayaan, Perempuan Disabilitas, Peran